



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 26 TAHUN 2006

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERTANIAN DI KOTA TASIKMALAYA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan Standar Pelayanan Minimal ;
 - b. bahwa penetapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud huruf a di atas, berpedoman kepada standar pelayanan yang ditetapkan Pemerintah dan merupakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pertanian yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota Tasikmalaya ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pertanian di Kota Tasikmalaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 206/Kpts/OT.210/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Pertanian ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pertanian Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat ;
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya ;
16. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Unit Dinas Pertanian Kota Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERTANIAN DI KOTA TASIKMALAYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat ;
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ;
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
5. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya ;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya ;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan organisasi pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya ;
9. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
10. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan ;
11. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pertanian yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Pertanian adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib daerah di bidang pertanian yang sekaligus menjadi tolok ukur pencapaian target kinerja penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pertanian dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara minimal sesuai karakteristik, kondisi dan kemampuan daerah ;
12. Urusan Wajib Bidang Pertanian adalah penyelenggaraan pelayanan pada bidang pertanian yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar masyarakat yang pelaksanaannya

- berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah dan dijabarkan menurut jenis pelayanan ;
13. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib berskala Daerah yang pencapaiannya ditentukan berdasarkan indikator kinerja ;
 14. Indikator Kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis pelayanan berdasarkan nilai terukur sebagai target pencapaian yang ditetapkan ;
 15. Nilai sebagai target pencapaian adalah hasil terukur target pencapaian kondisi penyelenggaraan Pertanian yang diharapkan sampai pada tahun 2010 ;
 16. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan ;
 17. Tim Evaluasi SPM adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melaksanakan evaluasi SPM Bidang Pertanian ;
 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Bidang Pertanian adalah sebagai acuan bagi SKPD penyelenggara kewenangan daerah dalam melaksanakan urusan wajib Pemerintahan Daerah di bidang penyelenggaraan Pertanian yang terdiri dari Sub Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, serta Perikanan dalam skala minimal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Pertanian adalah dalam rangka :

- a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan lingkup pertanian kepada masyarakat ;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan lingkup pertanian di daerah ;
- c. memberikan standar yang jelas sebagai tolok ukur pemenuhan pelaksanaan pelayanan dasar kepada masyarakat dalam lingkup penyelenggaraan urusan wajib pertanian.

Pasal 4

Fungsi ditetapkannya SPM Bidang Pertanian adalah :

- a. alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah sebagai

- penyedia kebutuhan dan keperluan pelayanan dasar bidang pertanian kepada masyarakat ;
- b. tolok ukur keberhasilan kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pertanian kepada masyarakat ;
 - c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan dasar pertanian kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja ;
 - d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD bidang pertanian ;
 - e. alat monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan wajib bidang Pertanian di daerah.

BAB III

BENTUK DAN ISI SPM

Pasal 5

SPM Bidang Pertanian ditetapkan menurut bentuk dan isi yang meliputi urusan wajib, jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target tahunannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) SKPD yang membidangi penyelenggaraan urusan wajib bidang pertanian, menurut wewenang dalam tugas pokok dan fungsinya wajib bertanggung jawab melaksanakan tugas pelayanan minimal sesuai dengan SPM Bidang Pertanian.
- (2) SKPD lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib menunjang terlaksananya pencapaian SPM Bidang Pertanian.
- (3) Di luar jenis pelayanan dalam urusan wajib sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan ini, SKPD yang membidangi penyelenggaraan urusan wajib bidang pertanian dapat menyelenggarakan jenis pelayanan lainnya yang merupakan urusan wajib lainnya berdasarkan amanat Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 7

SPM Bidang Pertanian yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan rencana kerja masing-masing SKPD yang terkait pada penyelenggaraan urusan wajib sebagai kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan pertanian.

Pasal 8

Penyelenggaraan pelayanan pertanian sesuai SPM Bidang Pertanian dilakukan oleh pegawai sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 9

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM Bidang Pertanian adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan SPM Bidang Pertanian dapat dikerjasamakan dengan lembaga mitra Pemerintah Daerah ;
- b. Tim anggaran dalam melaksanakan penyusunan APBD maupun perencanaan pembangunan daerah untuk pembangunan bidang Pertanian pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan SPM Bidang Pertanian untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan ;
- c. SKPD penyelenggara SPM Bidang Pertanian melakukan sosialisasi standar pelayanan yang telah ditetapkan/dicapai serta mengembangkan standar-standar teknis pelayanan ;
- d. Walikota menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Evaluasi SPM Bidang Pertanian ;
- e. Tim Evaluasi SPM bersama SKPD penyelenggara SPM Bidang Pertanian melakukan survey kepuasan masyarakat secara teratur terhadap hasil pelaksanaan SPM Bidang Pertanian ;
- f. Tim Evaluasi SPM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja SKPD penyelenggara SPM Bidang Pertanian dan melaporkan hasilnya kepada Walikota.

Pasal 10

Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian target SPM Bidang Pertanian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 11

Sekretaris Daerah melalui Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah, Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah serta Unit Kerja lain yang terkait, memfasilitasi persiapan dan evaluasi penyelenggaraan SPM Bidang Pertanian oleh SKPD terkait serta menetapkan mekanisme koordinasi dan kerjasama.

Pasal 12

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi :

- a. penyusunan rencana kerja SKPD dan standar kinerja pencapaian target SPM Bidang Pertanian ;
- b. perhitungan kebutuhan biaya kegiatan bagi terselenggaranya pelayanan pertanian sesuai SPM Bidang Pertanian ;
- c. pengkoordinasian penyusunan laporan penyelenggaraan SPM Bidang Pertanian.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 13

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 9, dibentuk untuk melaksanakan evaluasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan SPM Bidang Pertanian .

Pasal 14

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 13, menyampaikan laporan penyelenggaraan SPM Bidang Pertanian kepada Walikota dan selanjutnya melaporkan kepada Gubernur Jawa Barat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan ini akan diatur dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 18 September 2006

WALIKOTA TASIKMALAYA

ttd

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 19 September 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2006 NOMOR 167

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------|
| | | | tanaman pangan dan peternakan | | | | | | | |
| | | 1.4. Evaluasi kinerja dan dampak pembangunan bidang pelayanan pertanian tanaman pangan dan peternakan | 1.4.1. Monitoring dan evaluasi pembangunan pertanian tanaman pangan dan peternakan dilakukan satu bulan sekali oleh petugas tingkat Kota sedangkan oleh petugas tingkat BPP dilakukan satu minggu satu kali | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Pengelolaan sumber daya alam | 2.1. Pengadaan penetapan tata ruang dan guna lahan | 2.1.1. Setiap penetapan tata ruang dan guna lahan harus dikuatkan dengan kebijakan pemerintah | 100 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | Kebijakan berbentuk Perda |
| | | 2.2. Pencegahan alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis dan setengah teknis | 2.2.1. Adanya sanksi khusus atas pelanggaran alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis dan setengah teknis yang terjamin airnya yang diatur dalam Peraturan Daerah | 100 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | kelembagaan ekonomi petani, penyuluh dan peneliti dan LSM | kelembagaan ekonomi petani setiap bulan | | | | | | | |
| | | | 5.3.2. Pembinaan terhadap penyuluh dan LSM, dilaksanakan 6 bulan sekali | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 5.4. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan petani penyuluh, peneliti dan LSM | 5.4.1. Pemerintah harus mensponsori kegiatan konsolidasi antar petani/nelayan, penyuluh dan LSM, minimal 6 bulan sekali | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 5.5. Pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh pertanian tanaman pangan dan peternakan | 5.5.1. Adanya kegiatan diklat, pelatihan dan studi banding penyuluh ke daerah lain yang dianggap lebih baik setiap tahun satu kali | 1 thn 1 kali | 1 thn 1 kali | 1 thn 1 kali | 1 thn 1 kali | 1 thn 1 kali | 1 thn 1 kali | |
| | | 5.6. Pembinaan dan pengelolaan lembaga penyuluh pertanian tanaman pangan | 5.6.1. Adanya pusat pembinaan dan pengelolaan lembaga penyuluh pertanian tanaman | 100 | 40 | 75 | 90 | 100 | 100 | 1 Unit untuk satu wilayah kerja penyuluhan |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| | | dan peternakan | pangan dan peternakan di setiap kecamatan | | | | | | | |
| | | 5.7. Pembinaan kepemimpinan petani, wanita tani dan pemuda tani | 5.7.1. Adanya satu tim pembina | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 Unit untuk satu wilayah kerja penyuluhan |
| | | 5.8. Pengelolaan laboratorium informasi dan perpustakaan bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan | 5.8.1. Adanya laboratorium informasi dan perpustakaan dengan buku-buku pertanian tanaman pangan dan peternakan | 100 | 30 | 50 | 75 | 100 | 100 | 1 Unit untuk satu wilayah kerja penyuluhan |
| | | 5.9. Pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana penyuluh bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan | 5.9.1. Setiap pelaksanaan bimbingan harus menggunakan alat peraga | 100 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 1 Unit untuk satu wilayah kerja penyuluhan |
| | | | 5.9.2. Penyediaan kendaraan operasional bagi penyuluh | 100 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 1 Unit kendaraan roda dua untuk setiap wilayah kerja penyuluhan dan 1 unit kendaraan roda empat untuk setiap kota |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | teknologi dan bimbingan aplikasi teknologi di tingkat petani | penyuluhan pada setiap kelompok tani di desa | | | | | | | |
| | | 6.6. Mengadakan demonstrasi pengkajian penerapan teknologi anjuran kondisi spesifik lokalita | 6.6.1. Demonstrasi pengkajian penerapan teknologi dilakukan oleh pemerintah 6 bulan 1 kali | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 6.7. Melaksanakan pembinaan penerapan teknologi | 6.7.1. Pembinaan penerapan teknologi dilakukan oleh Pemerintah daerah 6 bulan 1 kali | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 6.8. Rekayasa prototipe dan modifikasi alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokal | 6.8.1. Pengadaan rekayasa prototipe dan modifikasi alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokal | 100 | 45 | 50 | 85 | 100 | 100 | |
| | | 6.9. Melakukan kaji ulang alat mesin yang telah direkomendasikan secara periodik | 6.9.1. Kegiatan kaji ulang alat mesin yang telah direkomendasikan dilakukan setiap tahun | 100 | 35 | 60 | 85 | 100 | 100 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|----|----|----|-----|-----|--|
| | | 6.10. Mempelajari temuan-temuan teknologi baru | 6.10.1. Adanya kegiatan pembelajaran temuan-temuan baru 3 bulan satu kali | 100 | 25 | 60 | 75 | 100 | 100 | |
| | | 6.11. Mencatat dan melaporkan perkembangan teknologi pertanian tanaman pangan dan peternakan secara spesifik | 6.11.1. Adanya <i>database</i> tentang perkembangan teknologi pertanian tanaman pangan dan peternakan yang di <i>update</i> setiap 6 bulan 1 kali | 100 | 60 | 70 | 85 | 100 | 100 | |
| | | 6.12. Mengadakan kerjasama dengan sumber-sumber teknologi dalam rangka visualisasi penerapan teknologi yang disuluhkan | 6.12.1. Kerjasama dengan sumber-sumber teknologi dilakukan setiap 4 bulan 1 kali | 100 | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | |
| | | 6.13. Menginventarisasi hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian | 6.13.1. Inventarisasi hasil-hasil penelitian dilakukan oleh tim khusus dan menjadi suatu informasi yang bisa diakses setiap saat, satu tahun satu kali | 100 | 35 | 60 | 75 | 100 | 100 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | pembinaan pupuk dan pestisida | pembinaan pupuk dan pestisida dilakukan 6 bulan satu kali | | | | | | | |
| | | 7.5. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk dan pestisida | 7.5.1. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk dan pestisida dilakukan setiap bulan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 7.6. Pelaksanaan peringatan dini dan antisipasi terhadap kelangkaan pupuk dan pestisida | 7.6.1. Adanya minimal 1 unit pelayanan pupuk di setiap kecamatan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 7.7. Pengawasan peredaran, penyimpanan, penggunaan serta pemusnahan pupuk pestisida | 7.7.1. Pengawasan peredaran, penyimpanan, penggunaan serta pemusnahan pupuk pestisida dilakukan pemerintah setiap 3 bulan sekali | 100 | 65 | 75 | 90 | 100 | 100 | |
| 8 | Obat Hewan | 8.1. Bimbingan pemakaian sediaan biologik, farmasetic dan premic | 8.1.1. Bimbingan pemakaian sediaan biologik, farmasetic dan premic dilakukan pemerintah setiap | 100 | 60 | 70 | 85 | 100 | 100 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|
| | | | 6 bulan sekali | | | | | | | |
| | | 8.2. Bimbingan pengawasan sediaan biologik, farmasetic dan premic | 8.2.1. Bimbingan pengawasan sediaan biologik, farmasetic dan premic dilakukan pemerintah setiap 6 bulan 1 kali | 100 | 60 | 75 | 85 | 100 | 100 | |
| | | 8.3. Pengawasan peredaran obat hewan di tingkat kios dan pengecer | 8.3.1. Adanya tim pemantau terhadap peredaran obat hewan | 100 | 60 | 75 | 80 | 85 | 100 | 1 tim pemantau untuk 1 kecamatan |
| | | | 8.3.2. Pengawasan pemakaian sediaan biologic, farmasetic, dan premic dilakukan pemerintah setiap 6 bulan sekali | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 9 | Alat dan mesin pertanian tanaman pangan dan peternakan | 9.1. Perencanaan pengadaan alat dan mesin pertanian tanaman pangan dan peternakan | 9.1.1. Sebelum perencanaan dilakukan, minimal ada kegiatan pendataan kebutuhan alat dan mesin pertanian yang diajukan oleh petani satu tahun sekali | 100 | 60 | 75 | 85 | 100 | 100 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------|
| | | 9.2. Penggunaan alat mesin pertanian untuk keperluan lokalita | 9.2.1. Rekomendasi penggunaan alat mesin pertanian harus disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan petani satu tahun sekali | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 9.3. Perizinan pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian produk lokal atau impor | 9.3.1. Selambat-lambatnya izin dikeluarkan 1 minggu setelah persyaratan terpenuhi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 9.4. Pembinaan dan pengawasan mutu alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita | 9.4.1. Pembinaan dan pengawasan mutu alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita dilakukan 6 bulan sekali | 100 | 60 | 75 | 85 | 100 | 100 | |
| | | 9.5. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin pertanian | 9.5.1. Adanya sentra pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin pertanian di setiap kecamatan | 100 | 65 | 80 | 90 | 100 | 100 | 1 Sentra setiap Kecamatan |
| | | 9.6. Bimbingan cara pengoperasian dan pemeliharaan alat dan mesin | 9.6.1. Bimbingan cara pengoperasian dan pemeliharaan alat dan mesin | 100 | 65 | 75 | 90 | 100 | 100 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|
| | | | dilakukan setiap 6 bulan 1 kali | | | | | | | |
| | | 10.4. Pengawasan mutu pakan konsentrat dan bahan baku dalam pemakaian | 10.4.1. Pengawasan mutu pakan konsentrat dan bahan baku dalam pemakaian dilakukan setahun 4 kali untuk setiap jenis pakan yang beredar | 100 | 65 | 75 | 80 | 100 | 100 | |
| | | 10.5. Pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan dalam peredaran | 10.5.1. Adanya tim pengawas mutu pakan dan bahan baku pakan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 tim pengawas untuk setiap kota |
| 11 | Pembenihan tanaman | 11.1. Pembinaan balai benih milik swasta | 11.1.1. Pembinaan balai benih milik swasta dilakukan pemerintah (BPSB) | 100 | 25 | 50 | 55 | 100 | 100 | |
| | | 11.2. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih | 11.2.1. Pemerintah Daerah diharuskan melakukan pembinaan dan pengawasan penangkar benih | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 11.3. Pembinaan dan pengawasan perbanyak peredaran dan | 11.3.1. Pemerintah Daerah diharuskan melaksanakan | 100 | 60 | 75 | 90 | 100 | 100 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-----|----|----|----|-----|-----|---|
| | | penggunaan benih sebar | pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih sebar 6 bulan 1 kali | | | | | | | |
| | | 11.4. Bimbingan dan pemantauan produksi benih | 11.4.1. Pemerintah Daerah diharuskan melakukan bimbingan dan pemantauan produksi benih di setiap sentranya setiap bulan | 100 | 65 | 80 | 90 | 100 | 100 | |
| | | 11.5. Bimbingan penerapan standar-standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode | 11.5.1. Sekurang-kurangnya 50 % dari petani yang ada di kecamatan melaksanakan standar-standar teknis perbenihan yang telah dianjurkan | 75 | 55 | 60 | 70 | 75 | 75 | |
| | | 11.6. Pembinaan dan pengembangan sistem informasi pembenihan | 11.6.1. Setiap kecamatan harus memiliki pusat informasi yang menyediakan berbagai informasi tentang | 100 | 65 | 75 | 85 | 100 | 100 | 1 Unit pusat informasi untuk satu kecamatan |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------|
| | | | 1 tahun sekali | | | | | | | |
| | | 11.11. Penetapan sentra-sentra produksi | 11.11.1. Menetapkan sentra-sentra produksi secara sektoral di setiap wilayah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 sentra produksi untuk satu wilayah |
| | | 11.12. Memperbanyak dan menyalurkan mata tempel dan perbanyak bibit hortikultura | 11.12.1. Memperbanyak benih/bibit hortikultura, 1 unit | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | |
| | | | 11.12.2. Penyaluran mata tempel dan bibit hortikultura minimal dilakukan setiap 1 tahun 1 kali | 100 | 25 | 55 | 80 | 100 | 100 | |
| | | 11.13. Identifikasi benih/bibit varietas unggul lokal tanaman pangan dan hortikultura | 11.13.1. Kegiatan identifikasi benih/bibit varietas unggul lokal tanaman pangan dan hortikultura dilakukan 1 tahun 1 kali | 100 | 35 | 65 | 80 | 100 | 100 | |
| | | 11.14. Pemberian izin produksi benih | 11.14.1. Izin produksi benih diberikan 1 minggu setelah persyaratan dipenuhi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 11.15. Pemantauan dan | 11.15.1. Mengadakan | 100 | 65 | 75 | 85 | 100 | 100 | |

| | | evaluasi mutu benih yang beredar | pemantauan dan evaluasi mutu benih yang beredar setiap 6 bulan 1 kali | | | | | | | |
|----|-------------------|--|---|-----|----|----|----|-----|-----|--------------------------|
| 12 | Pembibitan ternak | 12.1.Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan, meliputi sarana, tenaga kerja mutu dan metode | 12.1.1.50 % dari petani menerapkan standar teknis yang berlaku | 100 | 60 | 75 | 90 | 100 | 100 | |
| | | 12.2.Bimbingan produksi bibit | 12.2.1.Kegiatan bimbingan produksi bibit dilaksanakan setiap bulan 1 kali | 100 | 65 | 75 | 85 | 100 | 100 | |
| | | 12.3.Bimbingan pembuatan pengesahan silsilah ternak | 12.3.1.Memiliki <i>database</i> pembibitan ternak | 100 | 30 | 60 | 80 | 100 | 100 | 1 Databased untuk 1 Kota |
| | | 12.4. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan atau produksi mudigah, alih mudigah, serta pemantauan pelaksanaan registrasi hasil mudigah | 12.4.1. Tersedia tenaga ahli peternakan | 100 | 55 | 70 | 85 | 100 | 100 | |
| | | 12.5.Bimbingan | 12.5.1 Diklat pelaksanaan | 100 | 30 | 60 | 85 | 100 | 100 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| | | pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta | inseminasi buatan untuk masyarakat (masyarakat yang melaksanakan inseminasi buatan diluar pemerintah) 1 tahun 1 kali | | | | | | | |
| | | 12.6.Pengadaan mani beku ternak produksi dalam negeri | 12.6.1.Tersedianya mani beku ternak produksi dalam negeri yang diunggulkan 3 bulan 1 kali | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 12.7.Pengujian populasi dasar ternak, seleksi dan registrasi ternak bibit | 12.7.1.Pemerintah menyediakan 1 pos inseminasi di setiap 1 unit lingkungan | 100 | 25 | 55 | 80 | 100 | 100 | 1 Pos untuk 1 unit wilayah kerja lingkungan |
| | | 12.8.Pemberian izin produksi bibit | 12.8.1.Pemberian izin produksi bibit, paling lama dikeluarkan 1 minggu setelah persyaratan diajukan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 12.9.Pengawasan peredaran mutu bibit | 12.9.1.Adanya satu tim pengawas | 100 | 25 | 50 | 80 | 100 | 100 | 1 Tim Pengawas untuk 1 Kota |
| | | 12.10.Pemantauan dan inventarisasi potensi wilayah sumber daya ternak bibit | 12.10.1 Tersedia <i>database</i> potensi wilayah sumber daya ternak bibit | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 Databased untuk satu Kota |
| | | 12.11.Pemantauan dan pengawasan | 12.11.1.Memiliki sanksi khusus yang mengiringi | 100 | 25 | 65 | 75 | 100 | 100 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------|
| | | penyalur ternak bibit yang dilakukan swasta | pengawasan terhadap penyalur ternak bibit yang dilakukan swasta | | | | | | | |
| | | 12.12.Pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil inseminasi buatan | 12.12.1.Adanya hasil yang dilaporkan oleh pemerintah setiap bulannya dari hasil registrasi inseminasi buatan yang dilakukan oleh masyarakat | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 13 | Perlindungan tanaman | 13.1Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pemberantasan dan analisis dampak kerugian organisme pengganggu tumbuhan | 13.1.1.Memiliki databased yang memuat tentang keberadaan hama pengganggu berikut dengan identifikasi pemetaannya | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | |
| | | 13.2.Pengumpulan dan pengolahan data OPT dan agroklimat | 13.2.1 Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data OPT, dilakukan setiap bulan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 13.3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT dan rekomendasi pengendaliannya | 13.3.1.Terdapat 1 petugas pemerintah disetiap kecamatan yang mampu menangani masalah hama dan penyakit tanaman | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 Petugas untuk 1 Kecamatan |
| | | 13.4.Pengamatan dan pemantauan daerah | 13.4.1.Mengadakan penelitian dan | 100 | 30 | 60 | 80 | 100 | 100 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------|
| | | yang dicurigai sebagai sumber infeksi OPT | perlakuan khusus terhadap daerah yang dicurigai sebagai sumber infeksi OPT | | | | | | | |
| | | | 13.4.2.Untuk daerah yang dicurigai sebagai sumber infeksi OPT, mengadakan pemantauan setiap minggu 1 kali | 100 | 30 | 55 | 75 | 100 | 100 | |
| | | 13.5.Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman | 13.5.1.Menyediakan pos pengendalian /eradikasi tanaman disetiap kecamatan | 100 | 50 | 65 | 85 | 100 | 100 | 1 Pos untuk satu kecamatan |
| | | 13.6.Pelaksanaan penyidikan penyakit tanaman | 13.6.1.Memiliki satu tim ahli yang mampu melakukan penyidikan penyakit tanaman setiap tahunnya | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 Tim ahli untuk setiap tahun di Kota |
| | | 13.7.Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular bidang pertanian | 13.7.1.Memiliki satu tim penanggulangan wabah hama dan penyakit menular | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 13.8. Pengelolaan laboratorium hama dan penyakit | 13.8.1.Memiliki laboratorium hama dan penyakit tanaman di setiap | 100 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|-----|----|----|----|-----|-----|--|
| 14 | Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 14.1. Pembangunan dan pengelolaan laboratorium kesehatan hewan Tipe C | 14.1.1. Memiliki laboratorium kesehatan hewan | 100 | 25 | 55 | 80 | 100 | 100 | |
| | | 14.2. Pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan | 14.2.1 Setiap kawasan peternakan diharuskan memiliki satu unit sentra peternakan, yang melakukan kegiatan pemasaran dan pelayanan kesehatan | 100 | 30 | 60 | 85 | 100 | 100 | |
| | | 14.3. Pengamatan dan pencatatan kejadian penyakit hewan lingkup kota | 14.3.1. Setiap kecamatan harus memiliki satu tim peneliti yang mengkhususkan satu <i>database</i> lengkap tentang penyakit hewan yang ada di daerahnya | 100 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | |
| | | 14.4. Penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasiti, bakteriawi, virus dan penyakit hewan lainnya | 14.4.1. Pemerintah Daerah memiliki satu tim peneliti yang mengkhususkan diri terhadap epidemiologi penyakit hewan setiap tahunnya | 100 | 35 | 60 | 80 | 100 | 100 | |
| | | 14.5. Pemetaan | 14.5.1. Pengadaan | 100 | 35 | 65 | 85 | 100 | 100 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|----|----|----|-----|-----|--|
| | | penyakit hewan | database di setiap kawasan peternakan yang berisi tentang pemetaan penyakit hewan | | | | | | | |
| | | 14.6. Bimbingan, pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar | 14.6.1 Pelaksanaan bimbingan-bimbingan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar minimal dilaksanakan 3 bulan satu kali | 100 | 25 | 55 | 85 | 100 | 100 | |
| | | 14.7. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan | 14.7.1. Pengadaan program bantuan khusus untuk kesejahteraan hewan | 100 | 30 | 65 | 85 | 100 | 100 | |
| | | 14.8. Pemantauan dan pengawasan penerapan standar-standar teknis pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan | 14.8.1. Memiliki standar-standar teknis pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan | 100 | 25 | 55 | 80 | 100 | 100 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------|
| | | | <i>open acces information</i> | | | | | | | |
| | | 16.6.Pemberian izin RPH (Rumah Potong Hewan) kecuali untuk ekspor/impor | 16.6.1.Memiliki persyaratan yang ditetapkan dalam rangka pemberian izin terhadap RPH | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 17 | Pembinaan usaha | 17.1.Pengumpulan, pengolahan, pelayanan dan penyebarluasan informasi pertanian | 17.1.1. Menyediakan pos pelayanan informasi pertanian tanaman pangan dan peternakan | 100 | 55 | 70 | 85 | 100 | 100 | |
| | | 17.2.Pelaksanaan studi Amdal/UKL-UPL di bidang pertanian | 17.2.1.Pembahasan studi Amdal/UKL dan UPL dilaksanakan setiap 1 tahun satu kali dengan instansi terkait | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 17.3.Pelaksanaan promosi komoditas pertanian | 17.3.1.Setiap kelompok tani di kecamatan harus menjadi anggota koperasi di daerahnya | 100 | 50 | 75 | 90 | 100 | 100 | |
| | | 17.4.Bimbingan penerapan standar-standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil pertanian | 17.4.1.Minimal terdapat 1 radio komunitas Petani yang dikelola oleh pemerintah | 100 | 28 | 55 | 87 | 100 | 100 | |
| | | 17.5.Bimbingan pengolahan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan | 17.5.1.Penggunaan alat peraga sesuai atau sampel, dalam pelaksanaan bimbingan | 100 | 25 | 60 | 80 | 100 | 100 | Alat peraga atau sampel |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | hasil pertanian | | | | | | | | |
| | | 17.6. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil pertanian | 17.6.1. Pelaksanaan bimbingan melibatkan ahli sosial ekonomi pertanian tanaman pangan dan peternakan atau tenaga ahli dari Dinas Koperasi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 17.7. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani | 17.7.1. Minimal ada 1 koperasi untuk setiap kecamatan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 17.8. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian | 17.8.1. Memiliki penyuluh yang ditempatkan disetiap wilayah kerja penyuluh | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 17.9. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha pertanian | 17.9.1. Kegiatan pembinaan sanitasi lingkungan dan kesehatan farm/RPH/RPU dilaksanakan minimal 3 kali dalam setahun | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 17.10. Bimbingan pelaksanaan AMDAL | 17.10.1. Ada 1 kali diklat Amdal dalam satu tahun, yang | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|
| | | | dilaksanakan pemerintah dengan melibatkan aparat dan petani | | | | | | | |
| | | 17.11.Pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk pertanian | 17.11.1.Adanya kegiatan pemantauan terhadap mutu produk yang dilakukan setiap panen dilakukan | 100 | 30 | 55 | 85 | 100 | 100 | |
| | | 17.12.Pemantauan dan pengawasan izin usaha agroindustri | 17.12.1.Memiliki sanksi khusus dalam rangka pengawasan usaha agro-industri | 100 | 27 | 50 | 55 | 100 | 100 | Sanksi berupa Keputusan Walikota |
| | | 17.13.Pemberian izin industri | 17.13.1.Memiliki dan menetapkan persyaratan untuk pemberian izin industri | 100 | 30 | 55 | 85 | 100 | 100 | |
| 18 | Sarana usaha | 18.1. Bimbingan pemanfaatan sumber pembiayaan agribisnis | 18.1.1. Memiliki 1 tim tenaga konsultan pembiayaan agribisnis | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 18.2. Bimbingan pemanfaatan kredit agrobisnis | 18.2.1. Setiap LKM di kecamatan harus memiliki konsultan khusus agrobisnis | 100 | 45 | 65 | 85 | 100 | 100 | |
| | | 18.3. Pembinaan dan bimbingan | 18.3.1. Harus mengadakan diklat | 100 | 25 | 50 | 80 | 100 | 100 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------|---|--|-----|----|----|----|-----|-----|--|
| | | terhadap lembaga keuangan mikro pedesaan | minimal 1 tahun 1 kali untuk tenaga profesional LKM | | | | | | | |
| | | | 18.3.2. Adanya satu tim pembina | 100 | 30 | 55 | 85 | 100 | 100 | |
| | | 18.4. Pemantauan dan evaluasi penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian kredit | 18.4.1. Harus memiliki satu tim pemantau penyaluran kredit di setiap kecamatan | 100 | 35 | 55 | 85 | 100 | 100 | |
| 19 | Ketahanan pangan | 19.1. Pembinaan perbaikan mutu pangan masyarakat | 19.1.1. Memiliki anggaran khusus untuk perbaikan mutu pangan masyarakat | 100 | 30 | 60 | 85 | 100 | 100 | |
| | | 19.2. Pengembangan sumber daya manusia di bidang kewaspadaan dan pengembangan mutu pangan siap konsumsi | 19.2.1. Melaksanakan 1 kegiatan pengembangan SDM di bidang kewaspadaan dan pengembangan mutu pangan setiap tahun | 100 | 25 | 55 | 80 | 100 | 100 | |
| | | 19.3. Penggalangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan cadangan pangan | 19.3.1. Memiliki program pengelolaan cadangan pangan oleh masyarakat, 1 tahun 1 kali | 100 | 35 | 65 | 85 | 100 | 100 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | 19.4.Peningkatan motivasi masyarakat/ aparat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan | 19.4.1.Mengadakan 2 kali diklat setiap tahunnya bagi aparat dan masyarakat | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 19.5. Penyuluhan, penerangan kepada masyarakat tentang ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga | 19.5.1.Terdapat 1 tim penyuluh yang bertugas melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat tentang ketahanan pangan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 19.6.Gerakan sosialisasi pengembangan lumbung pangan masyarakat dan stabilitasi harga pangan | 19.6.1 Memiliki satu lumbung modern untuk setiap kawasan | 100 | 35 | 65 | 80 | 100 | 100 | |
| | | 19.7. Fasilitasi penyuluhan dan pelatihan penganeekaragaman konsumsi pangan wilayah | 19.7.1.Pengadaan kegiatan demo dan pelatihan penganeekaragaman pangan setiap 1 tahun 1 kali | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 19.8. Kebijakan pelaksanaan kewaspadaan pangan | 19.8.1.Memiliki Perda yang mengatur masalah ketahanan pangan | 100 | 35 | 70 | 80 | 100 | 100 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | rangka gerakan ketahanan pangan masyarakat | | | | | | | | |
| | | 19.14.Gerakan pengane-karagan konsumsi pangan berbasis sumber pangan wilayah | 19.14.1.Adanya kegiatan kompetisi bagi masyarakat yang mendorong terhadap gerakan pengane-karagan pangan 1 kegiatan 1 tahun | 100 | 25 | 55 | 80 | 100 | 100 | |
| | | 19.15.Koordinasi lintas wilayah dalam rangka kecukupan pangan dan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat | 19.15.1.Pemerintah Daerah memiliki 1 kegiatan kecukupan pangan yang dilakukan secara bersama, 1 tahun 1 kali | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 19.16.Fasilitasi pelaksanaan, norma-norma dan standar pengembangan distribusi pangan | 19.16.1.Pemerintah minimal harus memiliki 1 sentra distribusi pangan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 19.17.Pengelolaan jaminan mutu | 19.17.1.Memiliki 1 pengawas mutu pangan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 19.18.Koordinasi penanggulangan kerawanan pangan | 19.18.1.Memiliki 1 kegiatan rutin dan satu kegiatan cadangan untuk | 100 | 25 | 55 | 80 | 100 | 100 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | menanggulangi kerawanan pangan setiap tahun | | | | | | | |
| | | 19.19.Perumusan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan bencana gejala kekurangan pangan serta keadaan darurat pangan | 19.19.1.Memiliki databased berikut analisisnya atas kejadian kerawanan pangan yang telah terjadi sebelumnya | 100 | 30 | 60 | 80 | 100 | 100 | |
| | | 19.20.Pengembangan peran serta koperasi dan swasta dalam menanggulangi kerawanan pangan | 19.20.1.Dilaksanakan 1 kegiatan ketahanan pangan yang dikelola oleh pemerintah setiap tahunnya | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 19.21.Pemantauan produksi dan ketersediaan/ cadangan pangan strategis nabati hewani | 19.21.1.Kegiatan pemantauan produksi dan ketersediaan cadangan pangan minimal dilakukan setiap 6 bulan 1 kali | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 19.22.Pemantauan, pengkajian dan pengembangan cadangan pangan pemerintah | 19.22.1.Diadakan kegiatan penelitian pengembangan pangan setiap 6 bulan 1 kali | 100 | 30 | 55 | 80 | 100 | 100 | |
| | | 19.23.Pemantauan, pengkajian dan | 19.23.1.Memiliki alat verifikasi untuk | 100 | 25 | 60 | 85 | 100 | 100 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 20.3.Peramalan dan perhitungan produksi hasil pertanian tanaman pangan dan peternakan | 20.3.1. Memiliki data perhitungan produksi hasil pertanian tanaman pangan dan peternakan setiap 3 bulan sekali | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Update data setiap tahun |
| | | 20.4.Pengadaan SDM perstatistikan dan sistem informasi pertanian tanaman pangan dan peternakan | 20.4.1. Mengadakan kegiatan diklat perstatistikan setiap tahunnya | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 kali Diklat setiap tahun |
| | | 20.5.Pengadaan sarana dan prasarana perstatistikan dan informasi pertanian tanaman pangan dan peternakan | 20.5.1. Minimal ada satu sarana operasional untuk setiap tenaga perstatistikan | 100 | 40 | 65 | 85 | 100 | 100 | 1 sarana operasional untuk 1 Petugas |
| | | 20.6.Diseminasi kepada pemakai | 20.6.1.Memiliki pos pelayanan perstatistikan bagi pemakai yang dikelola secara profesional | 100 | 40 | 65 | 80 | 100 | 100 | 1 Pos untuk 1 Kota |
| | | 20.7.Perawatan dan evaluasi sistem teknologi dan sistem | 20.7.1 Minimal harus ada satu tim yang menangani | 100 | 35 | 70 | 85 | 100 | 100 | 1 Tim untuk satu Kota |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | informasi | masalah sistem teknologi informasi, termasuk penyediaan informasi pasar secara berkala | | | | | | | |
|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|

**II. PELAYANAN SUB BIDANG PERKEBUNAN DI SELURUH KOTA TASIKMALAYA
TARGET TAHUN 2006 S.D. 2010**

| No. | URUSAN WAJIB | JENIS PELAYANAN | INDIKATOR KINERJA | NILAI | TARGET TAHUNAN | | | | | PENJELASAN |
|-----|------------------------------|-----------------------------------|--|-------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| | | | | | 2006 (%) | 2007 (%) | 2008 (%) | 2009 (%) | 2010 (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Perencanaan dan Pengendalian | 1.1.Penyusunan rencana perkebunan | 1.1.1.Pemerintah Daerah membuat rencana perkebunan | 100 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 5 tahun sekali |
| | | | 1.1.2.Pembentukan dan pembagian wilayah areal perkebunan dilakukan dengan melibatkan | 100 | 10 | 30 | 50 | 75 | 100 | 5 tahun sekali |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|---|-----|----|----|----|----|-----|--------------------|
| | | | masyarakat dan <i>stakeholders</i> perkebunan | | | | | | | |
| | | 1.2.Penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan kebun | 1.2.1.Penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan kebun | 100 | 20 | 40 | 55 | 75 | 100 | Jika ada perubahan |
| | | | 1.2.2 Dalam melakukan penetapan kawasan perkebunan terpadu harus melibatkan masyarakat setempat dan <i>stakeholders</i> | 100 | 20 | 45 | 60 | 85 | 100 | 5 tahun sekali |
| 2 | Perbenihan | 2.1. Pembangunan, pengelolaan dan pembinaan balai benih | 2.1.1. Pemberian rekomendasi untuk izin usaha penangkaran benih harus dipermudah | 100 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 2-3 tahun |
| | | 2.2. Pelaksanaan sertifikasi benih | 2.2.1. Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi untuk sertifikasi benih kepada penangkar benih yang memenuhi standar | 100 | 15 | 30 | 70 | 90 | 100 | Sesuai Kebutuhan |
| | | 2.3. Penerapan standar teknis perbenihan/ | 2.3.1. Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan | 100 | 20 | 45 | 60 | 85 | 100 | Sesuai Kebutuhan |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------------------|---|-----|----|----|----|----|-----|---|
| | | pembibitan | sistem informasi perbenihan/ pembibitan berdasarkan pedoman dikeluarkan Provinsi pada yang oleh | | | | | | | |
| | | | 2.3.2. Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi benih/bibit, mutu benih dan varietas komoditas | 100 | 10 | 25 | 40 | 70 | 100 | Minimal 1 tahun sekali |
| 3 | Pupuk dan Pestisida | 3.1. Penyuluhan Penggunaan Pupuk | 3.1.1. Pemerintah Daerah menyusun rencana kebutuhan pupuk dan pestisida untuk pemenuhan kebutuhan petani | 100 | 25 | 40 | 60 | 85 | 100 | 1 tahun sekali |
| | | | 3.1.2. Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap pengadaan, distribusi dan penggunaan pupuk/pestisida di wilayahnya | 100 | 10 | 25 | 45 | 75 | 100 | 3 bulan sekali jika keadaan normal dan 1 bulan sekali jika keadaan tidak normal |
| | | 3.2. Pengadaan sistem informasi | 3.2.1. Untuk pengembangan sistem informasi | 100 | 15 | 25 | 45 | 75 | 100 | 1 tahun sekali sesuai dengan |

| | | perpupukan | perpupukan, Pemerintah Daerah minimal mengeluarkan brosur resmi atau selebaran kepada masyarakat | | | | | | | kebutuhan |
|---|-----------------|---|---|-----|----|----|----|----|-----|------------------|
| 4 | Alat dan mesin | 4.1. Penyusunan rencana kebutuhan dan identifikasi alat dan mesin | 4.1.1. Pemerintah Daerah melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan alat dan mesin pertanian | 100 | 25 | 45 | 65 | 75 | 100 | 1 Tahun sekali |
| | | | 4.1.2. Penyelenggaraan penyuluhan penggunaan alat dan mesin pertanian | 100 | 25 | 45 | 65 | 75 | 100 | Sesuai Kebutuhan |
| | | | 4.1.3. Pemantauan dan evaluasi pengadaan, distribusi dan penggunaan alat dan mesin pertanian | 100 | 25 | 45 | 65 | 75 | 100 | 1 tahun sekali |
| 5 | Perizinan Usaha | 5.1. Pemberian izin usaha perkebunan | 5.1.1. Pemerintah Daerah memberikan izin usaha perkebunan sampai dengan luasan 25 hektar | 100 | 25 | 50 | 70 | 90 | 100 | Sesuai Kebutuhan |
| | | | 5.1.2. Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi untuk izin | 100 | 10 | 25 | 45 | 70 | 100 | Sesuai Kebutuhan |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|---|-----|----|----|----|----|-----|------------------|
| | | | usaha perkebunan dengan luas di atas 25 ha | | | | | | | |
| | | | 5.1.3.Pemantauan dan evaluasi terhadap rekomendasi/izin yang sudah keluar dan terhadap pelaksanaan kegiatan perkebunan yang sudah berjalan | 100 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 1 tahun sekali |
| | | | 5.1.4.Pemerintah Daerah melaksanakan sistem informasi perizinan usaha perkebunan | 100 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | Sesuai Kebutuhan |
| 6 | Pengolahan dan pemasaran hasil | 6.1.Penyuluhan penggunaan unit pengolahan hasil | 6.1.1.Pemerintah Daerah melaksanakan penyuluhan penggunaan unit pengolahan hasil perkebunan | 100 | 25 | 45 | 65 | 75 | 100 | 1 tahun sekali |
| | | 6.2.Pemberian izin usaha pengolahan | 6.2.1.Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi permohonan, pemberian izin dan pengoperasian unit pengolahan hasil industri perkebunan | 100 | 25 | 45 | 65 | 75 | 100 | 1 tahun sekali |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|---|-----|----|----|----|----|-----|---------------------------------|
| | | | 6.2.2.Pemerintah Daerah memberikan izin usaha pengolahan hasil industri perkebunan sesuai dengan kewenangan dikaitkan dengan izin usaha perkebunan mencakup hubungan equivalensi kapasitas produksi | 100 | 10 | 20 | 50 | 90 | 100 | 1 tahun sekali |
| | | 6.3.Pengumpulan data informasi pasar (lokal, regional, nasional internasional) komoditas perkebunan | 6.3.1.Pemerintah Daerah melaksanakan pengumpulan data dan informasi untuk pemasaran hasil produksi | 100 | 25 | 45 | 65 | 85 | 100 | 1 bulan sekali |
| | | | 6.3.2.Pemerintah Daerah menyebarkan informasi komoditas perkebunan didaerahnya ke pasar lokal, regional, nasional maupun internasional | 100 | 10 | 25 | 50 | 80 | 100 | 1 bulan sekali sesuai kebutuhan |
| | | | 6.3.3. Untuk memperkenalkan komoditas perkebunan, Pemerintah Daerah harus kerjasama dengan pihak ketiga | 100 | 10 | 25 | 50 | 80 | 100 | 1 tahun sekali |
| 7 | Perlindungan Kebun | 7.1. Pemantauan, | 7.1.1.Pemerintah Daerah | 100 | 15 | 35 | 60 | 90 | 100 | 1 tahun sekali |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|----|----|----|----|-----|------------------------|
| | | pengamatan, peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) | menyelenggarakan pemantauan dan pemetaan atas penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) | | | | | | | |
| | | | 7.1.2.Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan pengendalian dan penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) | 100 | 20 | 40 | 70 | 90 | 100 | Minimal 3 bulan sekali |
| | | | 7.1.3.Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemantauan, pelaporan dan pengendalian gangguan usaha perkebunan. | 100 | 25 | 50 | 75 | 90 | 100 | 1 bulan sekali |
| | | 7.2. Memfasilitasi penyelenggaraan pengendalian hama terpadu | 7.2.1.Fasilitas pengendalian hama terpadu (PHT) | 100 | 20 | 35 | 55 | 85 | 100 | 1 tahun sekali |
| | | 7.3. Pemantauan penggunaan pestisida | 7.3.1.Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan pelaporan penggunaan pestisida oleh petani | 100 | 10 | 25 | 45 | 70 | 100 | 6 bulan sekali |
| | | | 7.3.2. Pemerintah Daerah menerapkan teknologi | 100 | 15 | 30 | 50 | 80 | 100 | 6 bulan sekali |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|------|--|--|-----|----|----|----|----|-----|----------------|
| | | | pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dengan penggunaan pestisida yang ramah lingkungan | | | | | | | | |
| 8 | Sumber Manusia | Daya | 8.1.Penyusunan kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja perkebunan | 8.1.1.Pemerintah Daerah menyusun kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja perkebunan | 100 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 1 tahun sekali |
| | | | | 8.1.2. Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) perkebunan harus mengikutsertakan <i>stakeholders</i> | 100 | 20 | 30 | 45 | 70 | 100 | 1 tahun sekali |
| 9 | Budidaya | | 9.1. Penyusunan rencana rehabilitasi, intensifikasi usaha tani | 9.1.1. Pemerintah Daerah menyusun rencana rehabilitasi, intensifikasi, diversifikasi dan ekstensifikasi usaha | 100 | 15 | 25 | 40 | 75 | 100 | 1 tahun sekali |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|--|--|-----|----|----|----|----|-----|-------------------|
| | | | tani di wilayahnya | | | | | | | |
| | | | 9.1.2. Pemerintah Daerah melaksanakan rehabilitasi, intensifikasi, diversifikasi dan ekstensifikasi | 100 | 20 | 30 | 45 | 70 | 100 | Sesuai kebutuhan |
| 10 | Penyuluhan | 10.1. Penyusunan dan penyebaran informasi mengenai perkebunan | 10.1.1. Pemerintah Daerah menyebarkan informasi mengenai perkebunan | 100 | 5 | 30 | 50 | 75 | 100 | 1 tahun sekali |
| | | | 10.1.2. Dalam menyusun rencana kebutuhan penyuluhan harus melibatkan <i>stakeholders</i> | 100 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | Satu tahun sekali |
| 11 | Data dan statistik | 11.1. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkebunan | 11.1.1 Pemerintah Daerah melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyampaian data serta informasi perkebunan | 100 | 20 | 45 | 65 | 95 | 100 | 6 bulan sekali |

**III. PELAYANAN SUB BIDANG KEHUTANAN DI SELURUH KOTA TASIKMALAYA
TARGET TAHUN 2006 S.D. 2010**

| No. | URUSAN WAJIB | JENIS PELAYANAN | INDIKATOR KINERJA | NILAI | TARGET TAHUNAN | | | | | PENJELASAN |
|-----|---|--|---|-------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | | | | 2006 (%) | 2007 (%) | 2008 (%) | 2009 (%) | 2010 (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Pelayanan Rekomendasi Pengelolaan Hutan Dan Hasil Hutan | 1.1. Pemberian rekomendasi pemanfaatan hasil hutan kayu, non kayu serta jasa | 1.1.1. Pemerintah Daerah harus menyertakan kebijakan pelestarian dan kemanfaatan bagi masyarakat sekitar dalam mengeluarkan rekomendasi usaha pemanfaatan hutan dan hasil hutan | 100 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | Masa berlaku 1 (satu) tahun dikeluarkan sesuai kebutuhan |
| | | | 1.1.2. Pemerintah Daerah menyertakan kebijakan pengaturan dalam menyelenggarakan rekomendasi perizinan | 100 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | Masa berlaku 3 tahun |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----|----|----|----|----|-----|--|
| | | | pengelolaan penggajian kayu bermesin | | | | | | | |
| | | | 1.1.3. Pemerintah Daerah menyertakan kebijakan pengaturan dalam menyelenggarakan rekomendasi perizinan pengelolaan sarang burung wallet | 100 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | Masa berlaku 1 (satu) tahun, rekomendasi dikeluarkan jika dibutuhkan |
| | | | 1.1.4. Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi untuk izin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang sudah dilindungi dengan menyertakan kebijakan pelestarian dan kemanfaatan bagi masyarakat sekitar | 100 | 10 | 40 | 70 | 90 | 100 | Masa berlaku 6 bulan |
| | | | 1.1.5. Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi izin untuk berburu dengan menyertakan kebijakan pelestarian | 100 | 10 | 40 | 70 | 90 | 100 | Masa berlaku 6 bulan |
| | | | 1.1.6. Pemerintah Daerah memberikan izin | 100 | 10 | 40 | 70 | 90 | 100 | 5 tahun sekali |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|--|-----|----|----|----|----|-----|------------------|
| | | | untuk pengelolaan persuteraan alam dengan menyertakan kebijakan pelestarian dan kemanfaatan bagi masyarakat sekitar | | | | | | | |
| | | | 1.1.7. Pemerintah Daerah memberikan izin untuk pengelolaan perlebahan, usaha tani, budidaya tanaman hias, jamur kayu dan tanaman obat dengan menyertakan kebijakan pelestarian dan kemanfaatan bagi masyarakat sekitar | 100 | 10 | 40 | 70 | 90 | 100 | 3 tahun sekali |
| | | | 1.1.8. Pemerintah Daerah memberikan izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan | 100 | 0 | 25 | 50 | 80 | 100 | 3 tahun sekali |
| 2 | Penataan Wilayah Hutan | 2.1. Penyelenggaraan inventarisasi terestris | 2.1.1. Pemerintah Daerah harus memiliki database terestris | 100 | 10 | 40 | 70 | 90 | 100 | Sesuai kebutuhan |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|---|-----|----|----|----|----|-----|---|
| | | 2.2. Pemetaan hutan dalam kawasan hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi di wilayah Kota | 2.2.1. Setiap pemetaan hutan dalam kawasan hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi harus partisipatif dan melibatkan seluruh <i>stakeholders</i> | 100 | 10 | 40 | 70 | 90 | 100 | Sesuai kebutuhan |
| | | | 2.2.2. Setiap pembentukan wilayah taman hutan raya dan hutan kota harus dikaji dengan strategis dan tepat guna | 100 | 10 | 40 | 70 | 90 | 100 | Sesuai kebutuhan |
| | | | 2.2.3. Setiap pengelolaan hutan raya dan hutan kota di wilayah Kota, Pemerintah Daerah menyediakan anggaran. | 100 | 10 | 40 | 70 | 90 | 100 | 1 Tahun Sekali |
| 3 | Perencanaan Pembangunan | 3.1. Penyelenggaraan pengurusan lahan kritis dan peningkatan produktivitas | 3.1.1. Pemerintah Daerah memiliki program pengurusan lahan kritis di luar kawasan hutan pertahun anggaran | 100 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 1 Tahun Sekali |
| | | | 3.1.2. Pemerintah Daerah menyusun rencana peningkatan produktivitas hutan dan hutan rakyat | 100 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 1 Tahun Sekali, evaluasi setiap 6 bulan |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|-----|----|----|----|----|-----|------------------|
| | | | pertahun anggaran | | | | | | | |
| | | 3.2. Penyelenggaraan hutan hak di wilayah Kota | 3.2.1. Setiap perencanaan pembuatan hutan rakyat dan kegiatan lainnya harus melibatkan partisipasi masyarakat dan <i>stakeholders</i> | 100 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | Evaluasi tahunan |
| 4 | Pengelolaan Urusan Pembangunan Dan Perlindungan Hasil Hutan | 4.1. Penyelenggaraan pengelolaan pembangunan hutan | 4.1.1. Setiap penyelenggaraan dan pembangunan hutan oleh pengelola harus melibatkan partisipasi masyarakat dan <i>stakeholders</i> | 100 | 35 | 55 | 75 | 95 | 100 | Sesuai Kebutuhan |
| | | 4.2. Penyelenggaraan perlindungan hasil hutan | 4.2.1. Setiap penertiban hasil hutan <i>illegal logging</i> harus dilakukan dengan transparan, agar hasil hutan <i>illegal</i> jelas masuk ke kas negara atau daerah | 100 | 30 | 50 | 70 | 90 | 100 | Sesuai Kebutuhan |
| 5 | Pembinaan Pengelolaan Hutan | 5.1. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan | 5.1.1. Setiap perehabilitasian hutan pada hutan produksi, hutan konservasi dan hutan | 100 | 25 | 45 | 65 | 85 | 100 | Sesuai Kebutuhan |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|---|---|-----|----|----|----|----|-----|-----------------------------------|
| | | | lindung Pemerintah harus masyarakat hutan | maka Daerah melibatkan sekitar | | | | | | | |
| 6 | Perlindungan Hutan | 6.1. Penyelenggaraan penghijauan dan konservasi | 6.1.1. Penghijauan dan konservasi | | 100 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 1 Tahun Sekali |
| | | | 6.1.2. Pelatihan keterampilan masyarakat dalam urusan penghijauan dan konservasi | | 100 | 30 | 50 | 60 | 75 | 100 | Sesuai Kebutuhan |
| | | 6.2. Penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana | 6.2.1. Pengadaan penyelenggaraan, pengamanan dan penanggulangan bencana hutan | | 100 | 25 | 45 | 65 | 85 | 100 | 1 Tahun Sekali |
| | | 6.3. Pencegahan dan pemberantasan hama penyakit pada tanaman hutan | 6.3.1. Pencegahan dan pemberantasan hama penyakit pada tanaman hutan dilakukan oleh pengelola | | 100 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | Selama Daur (setiap 1 kali daur) |
| | | | 6.3.2. Pemerintah Daerah harus melaksanakan penyuluhan kehutanan | | 100 | 30 | 45 | 60 | 80 | 100 | Setiap saat |
| 7 | Penatausahaan Hasil | 7.1. Pemungutan | 7.1.1. Setiap pemungutan | | 100 | 40 | 60 | 70 | 75 | 100 | 1 tahun sekali |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|-----|----|----|----|----|-----|-----------------------------------|-------------------|
| | Hutan | Dan Penatausahaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) | dan penata usahaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) harus sesuai dengan perimbangan keuangan dan nominalnya dimasukkan ke kas daerah secara transparan | | | | | | | | setiap tahun awal |
| 8 | Pengenaan Sanksi Atas Pelanggaran Peraturan Kehutanan | 8.1. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan hasil hutan | 8.1.1. Setiap pengenaan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan hutan dan tata usaha Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlakun | 100 | 30 | 45 | 65 | 85 | 100 | Dilakukan setiap kali pelanggaran | |

**IV. PELAYANAN SUB BIDANG PERIKANAN DI SELURUH KOTA TASIKMALAYA
TARGET TAHUN 2006 S.D. 2010**

| No. | URUSAN WAJIB | JENIS PELAYANAN | INDIKATOR KINERJA | NILAI | TARGET TAHUNAN | | | | | PENJELASAN |
|-----|--|---|---|-------|----------------|----------|----------|----------|----------|------------------------------|
| | | | | | 2006 (%) | 2007 (%) | 2008 (%) | 2009 (%) | 2010 (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Kebijakan dan Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | 1.1 Menyediakan informasi kebijakan, perencanaan pengelolaan dan pengawasan | 1.1.1 Penyajian informasi kebijakan perencanaan pengelolaan dan pengawasan SDKP 4 kali/ tahun | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| | | | 1.1.2. Sosialisasi kepada umum 4 kali/tahun | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| | | | 1.1.3 Pengadaan prasarana dan sarana pendukung | 100 | 0 | 50 | 75 | 100 | 100 | |
| | | | 1.1.4 Pelatihan/kursus bagian pegawai 4 kali/tahun | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| 2. | Tata Ruang Wilayah dan Potensi Kelautan | 2.1 Menyediakan tata ruang wilayah dan | 2.1.1 Pemantauan perkembangan tata | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | Koordinasi dengan unit kerja |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
| | dan Perikanan | potensi perikanan | ruang dan potensi | | | | | | | terkait |
| | | | 2.1.2. Sosialisasi dengan penyediaan maket dan papan peta | 100 | 0 | 50 | 75 | 100 | 100 | |
| | | | 2.1.3 Melakukan koordinasi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | 2.1.4. Mengadakan kursus/pelatihan bagi pegawai | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| 3. | Kebijakan Pemanfaatan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) | 3.1. Menetapkan kebijakan pemanfaatan dan pengawasan SDKP | 3.1.1 Melaksanakan kebijakan pemanfaatan dan pengawasan SDKP 4 kali/tahun | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | |
| | | | 3.1.2 Sosialisasi kepada umum 4 kali/tahun | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| | | | 3.1.3 Memiliki 4 (empat) orang pegawai strata satu yang menangani bidang pengawasan SDKP | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| | | | 3.1.4 Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait 4 kali/tahun | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| 4. | Peningkatan Kelembagaan dan | 4.1 Meningkatkan fungsi | 4.1.1 Melaksanakan program peningkatan | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | |

| | Sumber Daya Manusia | kelembagaan dan SDM | kelembagaan dan SDM | | | | | | | |
|----|---|--|---|-----|---|----|----|-----|-----|--|
| | | | 4.1.2. Menyediakan 4 (empat) orang tenaga teknis strata satu/D4 | 100 | 0 | 50 | 75 | 100 | 100 | |
| 5. | Pengawasan dan Perlindungan Kawasan SDKP Dalam Masalah Pencemaran | 5.1 Menetapkan program pengawasan dan perlindungan kawasan SDKP dalam masalah pencemaran | 5.1.1. Melaksanakan program upaya pengawasan dan perlindungan kawasan SDKP dalam masalah pencemaran | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| | | | 5.1.2. Mensosialisasikan kepada masyarakat 4 kali/ tahun | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| | | | 5.1.3. Memiliki 3 (tiga) orang pegawai strata satu /D4 yang menangani urusan tersebut | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| | | | 5.1.4. Melakukan pelatihan/kursus bagi pegawai 3 kali/ tahun | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| | | | 5.1.5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait 3 kali/tahun | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| 6. | Jaminan Berdasarkan Hukum Internasional | 6.1 Memberikan jaminan berdasarkan | 6.1.1 Menerbitkan keputusan /keterangan sebagai | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|-----|---|----|----|-----|-----|--|
| | | Hukum Nasional dan Konvensi Internasional | jaminan hukum nasional bagi setiap pengusaha perikanan | | | | | | | |
| | | | 6.1.2 Mensosialisasikan kepada masyarakat segala Keputusan dan instruksi Pemerintah Daerah dan Pusat 4 kali/ tahun | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| 7. | Memelihara Keamanan dan Penegakan Hukum | 7.1 Menyediakan petugas khusus penegakan hukum | 7.1.1 Memiliki 1 (satu) orang petugas khusus penegakan hukum | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| | | | 7.1.2 Melakukan penyuluhan hukum bagi pengusaha perikanan 4 kali/tahun | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| | | | 7.1.3 Melakukan operasi rutin komoditi perikanan bersama instansi terkait 4 kali/tahun | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| 8. | Sistem Perijinan Terpadu | 8.1 Meningkatkan Pelayanan | 8.1.1 Memiliki dan melaksanakan 1 (satu) sistem pelayanan terpadu dalam satu atap | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| | | | 8.1.2. Mensosialisasikan | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---|-----|---|----|----|-----|-----|--|
| | | | kepada masyarakat seluruh prosedur perijinan melalui pusat layanan informasi 12 kali/tahun | | | | | | | |
| 9. | Sosialisasi Kebijakan dan Perundang-undangan Kelautan dan Perikanan | 9.1 Menetapkan mekanisme sosialisasi | 9.1.1 Melaksanakan sosialisasi kebijakan perundang-undangan Perikanan kepada masyarakat 4 kali/tahun | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| | | | 9.1.2. Memiliki 4 (empat) orang pegawai strata satu/D4 yang menangani bidang perundang-undangan Perikanan | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| 10. | Pemetaan Potensi Wilayah SDKP | 10.1 Membuat Peta Potensi Wilayah SDKP | 10.1.1 Memiliki 2 (dua) buah peta potensi SDKP | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| | | | 10.1.2 Mensosialisasikan kepada masyarakat 4 kali /Tahun | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| | | | 10.1.3 Mengadakan pelatihan/kursus bagi pegawai 1 kali/ tahun | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|-----|----|----|----|-----|-----|---|
| | | | 10.1.4 Memiliki 4 (empat) orang tenaga strata satu/ D4 yang menangani peta potensi SDKP | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| 11. | Membangun Fasilitas Bagi Terciptanya Produksi Perikanan | 11.1 Membangun dan melengkapi fasilitas | 11.1.1 Membangun dan melengkapi fasilitas pendukung bagi terciptanya peningkatan produksi perikanan 2 kali/tahun | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | |
| 12. | Standar Mutu | 12.1 Standarisasi mutu | 12.1.1 Melakukan standarisasi mutu dan menerbitkan sertifikasi standar mutu sesuai dengan SNI 4 kali/tahun | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| | | | 12.1.2 Memiliki 1 (satu) buah laboratorium pengujian mutu hasil perikanan | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan yang sesuai SNI |
| | | | 12.1.3 Mengadakan pelatihan/ kursus bagi pegawai 1 kali/tahun | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| 13. | Peningkatan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | 13.1 Melakukan Peningkatan dan pengembangan | 13.1.1 Pemerintah Daerah membuat program dan melaksanakan | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |

| | (SDM) | SDM | program peningkatan dan pengembangan SDM 1 kali/tahun | | | | | | | |
|-----|--------------------|--|--|-----|----|----|----|-----|-----|--|
| | | | 13.1.2 Memiliki prasarana dan sarana pelatihan, peningkatan dan pengembangan SDM | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| | | | 13.1.3 Memiliki 3 (tiga) orang tenaga profesional perikanan | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| | | | 13.1.4 Memiliki 3 (tiga) orang pegawai Strata satu/D4 yang menangani urusan tersebut | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| 14. | Strategi Pemasaran | 14.1 Menetapkan kebijakan strategi pemasaran | 14.1.1 Memiliki strategi pemasaran 1 kali/tahun | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| | | | 14.1.2 Memiliki 2 (dua) buah pasar ikan khusus | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | |
| | | | 14.1.3 Memiliki sistem informasi pasar | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| | | | 14.1.4 Memiliki satu Koperasi Perikanan yang melayani | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | pembudidaya ikan | | | | | | | |
| | | | 14.1.5 Memiliki 3 (tiga) orang Pegawai strata satu/D4 yang menangani urusan pemasaran | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| 15. | Pengawasan Terhadap Pupuk, Pakan dan Obat-obatan | 15.1 Membuat program pengawasan | 15.1.1 Melaksanakan program pengawasan pupuk, pakan dan obat-obatan 3 kali/tahun | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| | | | 15.1.2 Melakukan koordinasi 3 kali/tahun | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | |
| | | | 15.1.3 Melakukan sosialisasi tentang pupuk, pakan dan obat-obatan yang dianjurkan 3 kali/tahun | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | |
| 16. | Bimbingan Penerapan Teknologi Panen, Pasca Panen | 16.1 Menetapkan program pembinaan dan bimbingan | 16.1.1 Memiliki dan melaksanakan program bimbingan penerapan teknologi panen pasca panen 1 kali/tahun | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | 16.1.2 Mensosialisasikan kepada masyarakat 4 | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------|--|--|---|--------|-----|-----|-----|-----|--------|
| | | | | kali /tahun | | | | | | | |
| | | | 16.1.3 | Terdapat 1 (satu) tenaga teknis di setiap Kecamatan | 100 | 0 | 25 | 75 | 100 | 100 | |
| | | | 16.1.4 | Memiliki 3 (tiga) pegawai Strata satu/ D4 yang menangani urusan tersebut | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| | | | 16.1.5 | Melaksanakan penyuluhan dan pelatihan 4 kali/ tahun | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | |
| 17. | Pelayanan Perijinan | 17.1 | Melaksanakan pelayanan perijinan | 17.1.1 | Memproses perijinan usaha perikanan | 7 Hari | 0 | 25 | 50 | 100 | 7 Hari |
| | | | | 17.1.2 | Melakukan sosialisasi mengenai proses perijinan usaha perikanan 4 kali/tahun | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 |
| 18. | Mengumpulkan, Mengolah dan Menganalisis Data Statistik serta Informasi Perikanan | 18.1 | Penyajian data dan informasi perikanan | 18.1.1 | Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data statistik dan Informasi perikanan setiap bulan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | 18.1.2 | Memiliki 2 (dua) petugas khusus strata | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|-----|---|----|----|-----|-----|--|
| | | | satu yang menangani urusan tersebut | | | | | | | |
| | | | 18.1.3 Pemerintah Daerah mengadakan pelatihan/kursus bagi pegawai 2 kali/tahun | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| 19. | Pembangunan Pengawasan dan Penerapan Standar Teknis Pasar Ikan | 19.1 Menetapkan kebijakan pembangunan, pengawasan dan penerapan standar teknis pasar ikan | 19.1.1 Memiliki dan melaksanakan program pembangunan, pengawasan dan penerapan standar teknis pasar ikan setiap tahun | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| | | | 19.1.2 Memiliki 2 (dua) pegawai Strata satu/D4 yang menangani urusan tersebut | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| | | | 19.1.3 Mengadakan pelatihan/kursus tentang standar teknis pasar ikan 2 kali/tahun | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| 20. | Pembangunan, Pengelolaan, Pengawasan dan Bimbingan Teknis Irigasi Air untuk Budidaya Ikan | 20.1 Membuat program pembangunan, pengelolaan, pengawasan, dan bimbingan | 20.1.1 Memiliki dan melaksanakan program pembangunan, pengelolaan, pengawasan, dan | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | teknis irigasi air untuk budidaya ikan | bimbingan teknis irigasi air untuk budidaya ikan 1 kali/tahun | | | | | | | |
| | | | 20.1.2.Memiliki sistem irigasi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | 20.1.3 Pengawasan dilakukan oleh 2 (dua) orang ahli teknis strata satu | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| | | | 20.1.4. Mengadakan pelatihan/kursus 2 kali/tahun | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| | | | 20.1.5.Melakukan penyuluhan kepada masyarakat setiap bulan | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| 21. | Bimbingan Pemantauan dan Pemeriksaan Higienitas dan Sanitasi Lingkungan Usaha Perikanan | 21.1 Melakukan bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha perikanan | 21.1.1 Memiliki dan melaksanakan program bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha perikanan 1 kali/ tahun | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| | | | 21.1.2.Melengkapi prasarana dan sarana penunjang program bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|-----|---|----|----|-----|-----|--|
| | | | dan sanitasi lingkungan usaha perikanan dengan laboratorium | | | | | | | |
| | | | 21.1.3 Memiliki 4 (empat) pegawai strata satu yang menangani urusan tersebut sebagai petugas teknis | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| | | | 21.1.4 Mengadakan pelatihan/ kursus 4 kali/tahun | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| 22. | Menganalisa dan Menanggulangi Residu Bahan Kimia Bahan Pakan dan Bahan Pangan Asal Ikan | 22.1 Melaksanakan analisa dan penanggulangan residu bahan kimia, bahan pakan dan bahan pangan asal ikan | 22.1.1 Memiliki dan melaksanakan program analisa dan penanggulangan residu bahan kimia, bahan pakan dan bahan pangan asal ikan 1 kali/ tahun | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| | | | 22.1.2 Melengkapi prasarana dan sarana penunjang program analisa dan penanggulangan residu bahan kimia, bahan pakan dan bahan pangan asal ikan | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | 22.1.3 Memiliki 4 (empat) pegawai strata satu yang menangani urusan tersebut | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| | | | 22.1.4 Mengadakan pelatihan/ kursus 2 kali/tahun | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| 23. | Mengawasi dan Memeriksa Lalulintas Ikan Hidup dari dan atau ke Daerah | 23.1 Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan lalulintas ikan hidup dari dan atau ke daerah | 23.1.1 Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan lalulintas ikan hidup dari atau ke daerah 1 kali/bulan | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| | | | 23.1.2 Memiliki 4 (empat) petugas teknis pengawas yang menangani urusan tersebut | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| | | | 23.1.3 Mengadakan pelatihan/ kursus 2 kali/tahun | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| 24. | Perhitungan Hasil Produksi Perikanan dan Meramalkannya | 24.1 Melakukan perhitungan hasil produksi perikanan dan meramalkannya | 24.1.1 Memiliki dan melaksanakan program perhitungan dan peramalannya hasil produksi perikanan 1 kali/tahun | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | 24.1.2 Melengkapi | 100 | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | prasarana dan sarana penunjang dalam upaya perhitungan dan peramalan hasil produksi perikanan | | | | | | | |
| | | | 24.1.3 Mensosialisasikan hasil pemantauan kepada masyarakat 4 kali/tahun | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| | | | 24.1.4.Memiliki 2 (dua) pegawai yang menangani urusan tersebut | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | 24.1.5 Melaksanakan pelatihan/ kursus 2 kali/tahun | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | |
| 25. | Menyusun Ketenagakerjaan Perikanan | 25.1 Menetapkan kebijakan ketenagakerjaan perikanan | 25.1.1 Melaksanakan penyusunan ketenagakerjaan perikanan 1 kali/tahun | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | 25.1.2.Memiliki peta ketenagakerjaan perikanan yang proporsional | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | |
| | | | 25.1.3.Mensosialisasikan perkembangan ketenagakerjaan | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|-----|---|----|----|-----|-----|--|
| | | | perikanan 4 kali/tahun | | | | | | | |
| 26. | Pelaksanaan Saresehan Tingkat Kota | 26.1 Melaksanakan Saresehan Tingkat Kota | 26.1.1 Memiliki dan melaksanakan program saresehan 2 kali/tahun | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| 27. | Pengawasan dan Bimbingan Penggunaan Pestisida | 27.1 Melakukan pengawasan dan bimbingan penggunaan pestisida | 27.1.1 Melaksanakan pengawasan dan bimbingan penggunaan pestisida 1 kali/minggu | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| | | | 27.1.2 Melengkapi prasarana dan sarana pengawasan dan bimbingan penggunaan pestisida dengan Laboratorium | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| | | | 27.1.3 Memiliki 2 (dua) pegawai Strata satu yang menangani bidang tersebut | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| | | | 27.1.4.Mengadakan pelatihan/ kursus dan penyuluhan 2 kali/tahun | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| 28. | Eksplorasi, Konservasi, Rehabilitasi dan | 28.1 Menyusun program eksplorasi, | 28.1.1 Memiliki dan melaksanakan program eksplorasi, | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|-----|---|----|----|-----|-----|--|
| | Pengelolaan Sumber Alam Hayati | eksploitasi konservasi, rehabilitasi dan pengelolaan sumber alam hayati | eksploitasi konservasi, rehabilitasi dan pengelolaan sumber alam hayati 1 kali/tahun | | | | | | | |
| | | | 28.1.2 Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat 12 kali/tahun | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| | | | 28.1.3 Melengkapi prasarana dan sarana penunjang program eksplorasi, eksploitasi, konservasi, rehabilitasi dan pengelolaan sumber alam hayati | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| | | | 28.1.4 Memiliki 3 (tiga) orang pegawai strata satu yang menangani urusan tersebut | 100 | 0 | 30 | 30 | 100 | 100 | |
| | | | 28.1.5. Memiliki peta potensi sumber daya alam hayati | 100 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | |
| 29. | Pengadaan dan Pengawasan Alat dan Mesin Perikanan | 29.1. Membuat program pengadaan dan pengawasan | 29.1.1 Intensitas pengawasan alat-alat mesin perikanan | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|-----|------|-----|-----|-----|-----|--|
| | | alat dan mesin perikanan | 1 kali/bulan | | | | | | | |
| | | | 29.1.2. Memiliki pegawai petugas teknis strata satu/D4 yang menangani bidang tersebut | 100 | 0 | 25 | 25 | 50 | 100 | |
| | | | 29.1.3 Mengadakan pelatihan bagi petugas | 100 | 0 | 25 | 50 | 50 | 100 | |
| 30. | Pengawasan, Pembinaan dan Penerapan Standar Teknis Pembenihan | 30.1 Membuat program pengawasan, pembinaan dan penerapan standar teknis pembenihan | 30.1.1 Memiliki dan melaksanakan program pengawasan, pembinaan dan penerapan standar teknis pembenihan 1 kali/ tahun | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | 30.1.2 Memiliki sebuah Balai Benih Ikan (BBI) / sentra pembudidayaan | 100 | 12,5 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| | | | 30.1.3 Memiliki pegawai strata satu yang menangani urusan tersebut | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| | | | 30.1.4. Mengadakan pelatihan/kursus bagi pegawai | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------|---|---|-----|----|----|----|-----|-----|--|
| 31. | Pemetaan dan Pengawasan Hama dan Penyakit Ikan, Serta Bimbingan Cara Penanggulangannya | 31.1 | Membuat program pemetaan dan pengawasan hama penyakit ikan serta bimbingan cara penanggulangannya | 31.1.1. Memiliki dan melaksanakan program pemetaan dan pengawasan hama penyakit ikan serta bimbingan cara penanggulangannya | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | |
| | | | | 31.1.2. Melengkapi prasarana dan sarana penunjang pelaksanaan pemetaan dan pengawasan hama penyakit ikan serta bimbingan cara penanggulangannya | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| | | | | 31.1.3. Memiliki 4 (empat) orang pegawai Strata satu yang menangani urusan tersebut | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |
| | | | | 31.1.4. Memiliki peta hama penyakit ikan | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | 31.1.5. Mengadakan pelatihan/kursus bagi pegawai 1 kali/tahun | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
|--|--|--|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|--|

WALIKOTA TASIKMALAYA

ttd

H. BUBUN BUNYAMIN